

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 4

TAHUN 2006

Kecil, Minat Bisnis Panas Bumi

JAKARTA - Kegiatan investasi pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia dinilai tidak menguntungkan selama harga jual listrik masih di bawah USD 5 sen per kilowatt per jam (kwh). Wakil Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Suryadharna mengatakan, jika ingin menggaet investor maka harga jual listrik panas bumi di atas USD 5 sen. Dia menjelaskan, agar proyek panas bumi bisa berkembang diperlukan konsistensi pemerintah dan menghargai kontrak panas bumi yang sudah diteken. "Selain itu dari sisi regulasi juga harus diperbaiki di antaranya masalah perpajakan," ujarnya. Suryadharna mengatakan, para investor juga menginginkan adanya kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usahanya. Selain itu, para pemilik modal juga menginginkan keadilan dalam penentuan harga jual panas bumi. Selama ini, harga jual panas bumi selalu USD 4,5 sen dan dinilai tidak menguntungkan. (tnr)**

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 7											TAHUN 2006																			

Pemerintah Tagih Janji DPR Sahkan UU Minerba

JAKARTA - Pemerintah menagih janji DPR untuk mensahkan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral Batubara (RUU Minerba) menjadi UU, menggantikan UU No 13 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan, pada tahun ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, disahkannya RUU Minerba menjadi UU sudah sangat mendesak untuk mengatasi masa transisi di sektor pertambangan yang nyaris tidak ada eksplorasi baru pada 10 tahun ini. "RUU tersebut harus segera disahkan untuk mengatasi masa transisi di sektor pertambangan saat ini yang cukup pelik," katanya di DESDM,

Selasa (7/11).

Sementara itu, Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi DESDM Simon Felix Sembiring mengatakan, saat ini pembahasan RUU Minerba baru sekitar 25%. "Dari 400 DIM (daftar inventaris masalah) baru dibahas sekitar 100 DIM. DPR dulu menargetkan Desember. Kami minta secepatnya, cuma kemarin terhalang reses sidang, terus beberapa fraksi juga minta pendalaman lagi," katanya.

Purnomo menjelaskan, investasi di pertambangan memang mandeg karena banyak investor yang menunggu lahirnya UU Minerba terbaru. "Tapi banyak kontrak yang diteken bupati dan walikota, ini yang kami tidak tahu

jumlahnya berapa. Ini adalah dampak dari UU Otonomi Daerah. Karenanya, kami imbau kepada bupati atau Pemda Tingkat II agar menyampaikan kontrak yang diketennya agar kami bisa memonitor dan mencatatnya," jelasnya.

Lahirnya UU Otonomi Daerah membuat bupati bebas menandatangani Kuasa Pertambangan (KP). Akibatnya, banyak KP yang arealnya berada di areal milik kontrak para pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan dan Pengelolaan Batubara (PKP2B) (tumpang tindih).

Selain itu, akibat banyak daerah tidak melaporkannya ke pemerintah pusat, sekitar 20 juta ton produksi batubara tidak tercatat di DESDM. (ari)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 3											TAHUN 2006																			

PERTAMBANGAN

Harga Jual Panas Bumi Rendah

JAKARTA (Media): Harga keekonomian panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik semestinya dipatok di atas US\$0,5 per kwh. Harga sebesar US\$0,45 yang menjadi acuan selama ini terlampau rendah.

Wakil Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Suryadharma, mengemukakan hal itu di sela-sela Konvensi Nasional Sistem Kompetensi Profesi Bidang Biologi dan Pertambangan di Jakarta, kemarin.

Menurut Suryadharma, harga jual di bawah US\$0,5 per kwh tidak dapat menutupi biaya investasi yang dikeluarkan untuk produksi panas bumi pembangkit listrik. Sebaliknya, harga di atas US\$0,5 kwh tidak saja akan tercapai tingkat keekonomian, tetapi juga masih mampu menyediakan listrik yang jauh lebih murah daripada bahan bakar minyak (BBM). "Selama ini kalau bicara panas bumi selalu 4,5 sen dolar (US\$0,045) per kwh, padahal itu tidak ekonomis. Kalau kita lihat harga minyak saja sudah US\$0,20 per kwh," tuturnya.

Selain masalah harga yang kurang ekonomis, Suryadharma mengatakan pengembangan panas bumi terkendala oleh belum jelasnya aturan lelang hak pengelolaan pa-

nas bumi. Meskipun dalam undang-undang disebutkan pengelolaan panas bumi diberikan melalui proses lelang, mekanisme yang jelas termasuk syarat dan tata cara lelang belum dijabarkan dalam peraturan pemerintah (PP).

Penjabaran mekanisme, lanjut Suryadharma, sangat diperlukan mengingat pelaksana lelang dilakukan berdasarkan lokasi panas bumi. Bila lokasi berada di wilayah satu kabupaten, lelang dilaksanakan bupati.

Namun, jika berada di dua kabupaten atau lebih, pelaksanaan lelang menjadi hak gubernur. Bila berada di wilayah dua provinsi, akan menjadi kewenangan menteri.

Sementara itu, Dirjen Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Simon Sembiring mengemukakan dalam draf revisi undang-undang tentang panas bumi, pemerintah mengusulkan digantinya sistem bagi hasil dengan royalti. Besarnya royalti sekitar 1%-2% per kwh bila panas bumi dipakai memproduksi listrik atau 3%-5% dari harga jual jika hanya berupa gas. Perubahan sistem bagi hasil menjadi royalti diharapkan mampu menarik minat investor untuk mengembangkan panas bumi. (Ndy/E-3)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HALAMAN : 1/9

OKT NOV DES
1 2 3 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TAHUN 2006

Investor Tidak Tertarik Bisnis Panas Bumi

JAKARTA — Kegiatan investasi pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia dinilai tidak menguntungkan selama harga jual listrik masih di bawah US\$ 5 sen per kilowatt-jam (kWh). Wakil Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Suryadharma mengatakan, jika ingin menggaet investor, harga jual listrik panas bumi harus di atas US\$ 5 sen. "Harga di setiap daerah berbeda," katanya kemarin.

Dia menjelaskan, agar proyek panas bumi bisa berkembang, pemerintah seharusnya konsisten dan menghargai kontrak panas bumi yang sudah diteken. "Selain itu, dari sisi regulasi harus ada perbaikan, di antaranya masalah perpajakan," ujarnya. Suryadharma mengatakan investor juga menginginkan adanya kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usahanya.

Selain itu, pemilik modal menginginkan keadilan dalam penentuan harga jual panas bumi. Selama ini harga jual panas bumi selalu US\$ 4,5 sen dan itu dinilai tidak menguntungkan. "Padahal harga jual listrik pembangkit yang menggunakan bahan bakar minyak sudah US\$ 20 sen," katanya.

Beban pengusaha juga bertambah dengan adanya usul penambahan royalti untuk daerah penghasil panas bumi proyek baru sebesar 1-2 persen per kWh untuk yang menghasilkan listrik. Sedangkan jika masih menghasilkan uap, sebesar 3-5 persen dari harga jual. "Penambahan itu akan berpengaruh terhadap harga jual listrik," ujarnya.

Selama ini bagian yang disetorkan untuk pemerintah sebesar 34 persen bagi proyek panas bumi yang sudah berjalan. Padahal dari perhitungan berdasarkan aturan perpajakan terbaru, yang disetorkan ke negara bisa mencapai 46 hingga 47 persen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengakui potensi panas bumi di Indonesia sangat besar, yakni setara dengan 27 ribu megawatt. Sedangkan yang dimanfaatkan baru di bawah 1.000 megawatt. Dia mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang sejumlah investor panas bumi.

Rencananya, untuk proyek panas bumi, kata Purnomo, akan ditenderkan oleh daerah karena sudah otonomi. Daerah yang memiliki potensi panas bumi di Indonesia berada di Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bali, dan Sulawesi Utara. ● MUHAMMAD FASABENI

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : TS

TAHUN 2006

Produksi nikel Inco bakal turun jadi 159 juta pon

BISNIS INDONESIA

MAKASSAR: PT International Nickel Indonesia (Inco) Tbk memprediksikan laju produksi tambangnya pada 2006 akan turun hingga menjadi 158 juta-159 juta pon nikel dalam matte, disebabkan transformer tanur listrik nomor 2 terbakar akhir Mei.

Presdir PT Inco Arif Siregar mengatakan penggantian, uji coba, dan pemasangan kembali tanur listrik yang terbakar membutuhkan waktu hampir 12 minggu, sehingga waktu memproduksi nikel banyak yang terbuang.

"Berdasarkan waktu yang terbuang dan keberhasilan kami pada tingkat produksi normal, kami memperkirakan produksi pada 2006 PT Inco akan turun menjadi 158 juta sampai 159 juta nikel dalam matte. Namun penurunan produksi tersebut, tidak menyebabkan gangguan pada pendapatan kami," ujarnya kepada *Bisnis*, akhir pekan lalu.

Menurut dia, perkiraan penurunan produksi tambang

Perkembangan produksi dan penjualan nikel dalam matte PT Inco (ribu ton)

Tahun	Produksi	Penjualan
2001	76,4	76,1
2002	72,2	72,5
2003	70,2	70,5
2004	59,5	61,9
2005	62,6	60,5

Sumber: Laporan tahunan PT Inco

Inco sudah diinformasikan kepada pemegang saham secara apa adanya, dan mereka bisa menerima terjadinya insiden kebakaran tanur listrik itu.

Malah, kata Arif, ekspose target produksi dan realisasi keuangan PT Inco kuartal III 2006, justru mendorong saham perusahaan tambang nikelnya begitu pesat.

"Saya hanya sampaikan apa adanya kepada pemegang saham, dan ternyata pasar merespons positif kinerja keuangan PT Inco [kuartal III]."

Menurut dia, PT Inco agak sulit mencapai target produksi tahun lalu sebesar 168 juta pon, dengan adanya insiden kebakaran transformer listrik

Mei silam.

Untuk triwulan III, ungkapnya, perseroan mencapai produksi sebesar 37,8 juta pon nikel dalam matte.

Padahal, di periode yang sama tahun lalu produksi PT Inco mencapai 43,3 juta pon.

"Namun demikian, dampak keuangan dari produksi yang lebih rendah, dapat dikompensasikan dengan harga nikel matte yang lebih tinggi."

Arif menambahkan hasil penjualan triwulan III 2006 yang tidak diaudit mencapai \$307,6 juta, naik 40% dari \$219 juta pada triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Dia mengatakan penjualan naik 17,4% menjadi \$748,1 juta pada sembilan bulan pertama 2006 dari \$653,7 juta pada periode sama tahun lalu.

"Laba bersih pada sembilan bulan pertama yang berakhir 30 September 2006 naik 17,4% menjadi \$247,9 juta atau \$0,25 per saham dari \$211,1 juta atau \$0,21 per saham pada periode Juni-September 2006," katanya. (K26)



OPERASIKAN FeNi III-
Aneka Tambang berharap kinerja
perseroan akan terdorong positif dari
dioperasikannya FeNi III.

Catat Produksi FeNi 9.923 Ton

PT Aneka Tambang Tbk (Antam) berhasil mencatat produksi feronikel sebanyak 9.923 ton selama periode sembilan bulan pertama 2006. Hasil ini telah melampaui total produksi selama periode 2005 yang hanya mencapai 7.400 ton.

Direktur Keuangan Antam Kurniadi Atmosasmito mengatakan, perseroan yang mencatatkan produksi bijih nikel pada kuartal III 2005 hanya mencapai 2,5 juta metrik ton berhasil ditingkatkan pada periode yang sama 2006 mencapai sebesar tiga juta metrik

ton. Harga jual feronikel kuartal ketiga 2005 adalah sebesar US\$ 6,86 per pound sedangkan pada pada periode yang sama 2006 mencapai US\$ 8,59 per pound.

Sementara itu, akibat kenaikan BBM Industri pada 1 Oktober 2006 (awal kuartal keempat 2006) telah mengalami penurunan kurang lebih sebesar 10%, dan menurutnya hal itu akan menurunkan biaya produksi Antam sehingga perseroan berpeluang meningkatkan laba bersih pada periode tersebut.

Selain itu, produksi feronikel

kuartal keempat 2006 kelak bertambah dibanding kuartal ketiga karena pabrik FeNi III telah mulai beroperasi dan harga komoditas yang terus meningkat.

Bak gayung bersambut, kondisi eksternal pun amat kondusif. Terlihat dari kebutuhan nikel dunia yang masih tinggi ditopang oleh permintaan yang tinggi dari China seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Masih ditambah kebutuhan pembangunan dari negara-negara bekas perang seperti Afganistan, Libanon dan Irak. ● 027C

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA		<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN :										TAHUN 2006																				

Produksi FeNi III Optimal pada Awal 2007

Antam Targetkan Produksi FeNi III Capai 24 Ribuan Ton

Paska penutupan pabrik selama tiga bulan, Antam yakin bisa menambah produksi feronikel pada tahun depan. Langkah perseroan meningkatkan kapasitas mesin diharapkan bisa mewujudkan produksi menjadi 24 ribu ton.

Jakarta, *Bisnis Harian* PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menargetkan peningkatan kapasitas produksi feronikel III pada tahun depan yang akan mencapai antara 22-24 ribu ton. Sebelumnya Antam mengumumkan akan menutup pabrik FeNi III selama kurang lebih tiga bulan, akibat kebocoran metal tap hole pabrik. Imbasnya, target produksi feronikel Antam tahun ini akan turun menjadi 13.000 hingga 16.000 ton.

Menurut Direktur Keuangan PT Antam, Kurniadi Atmosamito, dari penyelidikan awal menunjukkan bahwa beberapa menit setelah dilakukan penutupan metal tap hole dengan menggunakan alat mud gun, metal cair muncul di bagian sisi bawah metal tap hole. Kurniadi pun menga-

takan, pertumbuhan 2006 feronikel direvisi menjadi 13-15 ribu dari asalnya 19 ribu. "Hal ini juga dipicu adanya masalah pemogokan pabrik. Paska pemogokan sudah mulai terjadi pemanasan sampai 24 mega meskipun pulihnya 35 mega. Diharapkan kondisinya akan stabil kembali," ujarnya belum lama ini.

Kurniadi juga menjelaskan, pertumbuhan produksi feronikel dari tahun ke tahun totalnya cukup banyak. Setidaknya kontribusinya antara 80-90% dari feronikel sisanya berasal dari sumbangan produksi emas dan bauksit.

Setelah operasi komersial pabrik FeNi III dimulai, imbuh Kurniadi, manajemen berharap biaya tunai untuk memproduksi feronikel akan turun menjadi 7-10 ribu per lbs. Seiring dengan

adanya skala ekonomis serta pemasangan sistem copper cooler. "FeNi III optimal full pada akhir tahun ini atau awal tahun depan," katanya.

Di sisi lain, Kurniadi mengungkapkan, perusahaan berencana mengembangkan produk alumina. Rencananya dana investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan produk alumina sekitar US\$ 220-250 juta serta proyek smelter dengan anggaran dana US\$ 180-200 juta berasal dari debt equity 65% dan pinjaman 35%.

Penjualan Antam sampai kuartal III 2006 tumbuh 53,47 persen menjadi Rp 3,401 triliun, dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 2,216 triliun. Hal ini didorong peningkatan produksi dan penjualan feronikel perseroan serta pe-

ingkatan harga komoditas. Perseroan mencatat untuk 9 bulan tahun 2006, pendapatan dari feronikel tercatat naik 172 persen menjadi Rp 1,682 triliun seiring dengan kenaikan produksi dan harga jual. ● 027C

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA		<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>									
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI									
		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31					
HALAMAN : 7											TAHUN 2006

API: Harga Listrik Panas Bumi Ideal US\$ 0,05 Per Kwh

JAKARTA - Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) menyatakan harga jual listrik dari pengembangan panas bumi idelanya di atas US\$ 0,05 per kwh dari saat ini rata-rata US\$ 0,045 per kwh. Tingkat harga ini dinilai mampu mendorong pengembangan panas bumi di tanah air.

"Harus ada *fairness* dalam penentuan harga. Selama ini kalau bicara panas bumi selalu US\$ 0,045 per kwh, padahal itu tidak ekonomis. Kalau pembangkit minyak sudah mencapai US\$ 0,20 per kwh. Secara keekonomian, harga listrik panas bumi harusnya di atas US\$ 0,05 per kwh," ujar Wakil Ketua API Suryadharmas usai menghadiri 'Seminar Sistem Konvensi Kompetensi Bidang

Geologi dan Pertambangan' di Jakarta, Selasa (7/11).

Dia mengatakan, harga jual listrik seharusnya meningkat jika pajak yang ditanggung pengembang semakin tinggi. Menurut dia, saat ini pengembang panas bumi sangat terbebani pajak yang mencapai 46-47%. Pajak kontrak pengembangan panas bumi baru ditetapkan 30%, pajak pertambahan nilai (PPN) 10%, dan bea cukai hingga 12,5%.

Dirjen Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Simon Felix Sembiring menanggapi, harga listrik dari panas bumi itu ditentukan berdasarkan kemampuan PT PLN selaku satu-satunya pembeli listrik di tanah

air.

Simon juga menyampaikan, kontrak lama (*existing*) pengembangan panas bumi akan tetap mengacu pada UU Panas Bumi dengan sistem bagi hasil, sementara untuk kontrak baru mengacu pada sistem royalti. Nantinya, persentase dari bagi hasil dan royalti tersebut akan dibagi untuk pusat dan daerah.

"Untuk yang baru, royalti sebesar 1-2% dari harga jual listrik per kwhnya jika pengembang menghasilkan listrik. Jika dia menghasilkan uap (*steam*) itu besarnya 3-5% dari harga jual. Itu akan masuk dan dibahas dalam PP Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sedang dibahas pemerintah," jelasnya.

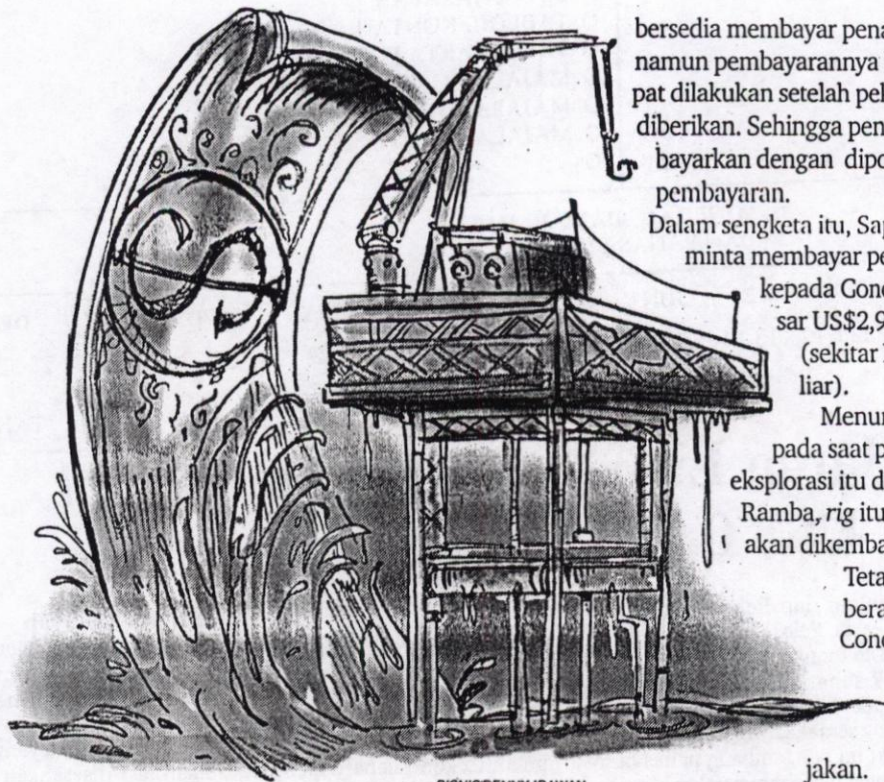
Tender Wilayah

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, tender wilayah kerja pengembangan panas bumi yang baru tidak akan lagi diserahkan kepada PT Pertamina (Persero). Tender akan diserahkan kepada daerah tempat lokasi wilayah kerja pengembangan panas bumi yang bersangkutan. Ini akan dilakukan menyusul era otonomi daerah dengan keluarnya UU No 19 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Purnomo, mekanisme tender dan persyaratan peserta tender akan diatur dalam PP yang saat ini telah diselesaikan draftnya dan telah masuk ke Sekretariat Negara. PP tersebut merupakan

petunjuk pelaksanaan UU No 23 Tahun 1971 tentang Panas Bumi. "Nantinya itu akan diatur dalam PP yang sebentar lagi akan dikeluarkan, tinggal menunggu pengesahan saja," katanya.

Saat ini, lanjut dia, potensi pengembangan panas bumi di Indonesia masih sangat besar, dengan cadangan listrik diperkirakan mencapai 27.000 MW dan baru termanfaatkan sekitar 800 MW. "Potensi panas bumi terbesar di Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Mencapai 40% potensi bumi dunia ada di Indonesia," katanya. Senin pekan depan, DESDM berencana mengundang investor panas bumi, untuk mengetahui apa yang mereka inginkan. (ari)



bersedia membayar penalti, namun pembayarannya baru dapat dilakukan setelah pekerjaan diberikan. Sehingga penalti dibayarkan dengan dipotong dari pembayaran.

Dalam sengketa itu, Sapta diminta membayar penalti kepada Gonoco sebesar US\$2,99 juta (sekitar Rp28 miliar).

Menurut dia, pada saat proyek eksplorasi itu ditangani Ramba, rig itu memang akan dikembangkan.

Tetapi ketika beralih ke Conoco terjadi perubahan kebijakan.

“Sampai saat ini rig itu sendiri tidak pernah dibuat. Jadi kalau dinyatakan terlambat *kan* tidak masuk akal,” ujar dia.

Sekadar informasi, sebelum Conoco Inc dan Phillips Petroleum Company merger menjadi ConocoPhillips, proyek eksplorasi tersebut ditangani oleh Gulf Resources Ramba.

Todung sendiri masih tetap mengharapkan agar sengketa antara kedua pihak dapat diselesaikan di luar pengadilan alias melalui arbitrase. Karena adanya klausul arbitrase, menurut dia seharusnya pengadilan tidak menerima kasus gugatan tersebut:

Namun, dalam putusan selanya, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Lief Sofijullah menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat berwenang mengadili gugatan Sapta meski kontrak antara kedua pihak telah mencantumkan klausul arbitrase.

Begitulah. Fakta persidangan sudah dipaparkan oleh penggugat dan tergugat. Kesimpulan sidang dari kedua pihak juga sudah diterima Majelis Hakim. Jadi, sekarang keputusan ada di tangan hakim. (*tri.dp@bisnis.co.id*)

paikan secara formal kabur dari tidak jelas karena telah mencampuradukkan antara wanprestasi dan pengakhiran kontrak.

Kedua, gugatan secara formal terbukti tidak lengkap. *Ketiga*, gugatan juga diajukan tidak berdasarkan hukum karena adanya manipulasi ketentuan hukum supaya PN Jakarta Pusat menjadi seolah-olah berwenang mengadili perkara ini. *Keempat*, Sapta seharusnya membayar tagihan ConocoPhillips yang telah jatuh tempo jauh sebelum diajukannya gugatan.

Namun, pihak Sapta mempunyai versinya sendiri. Menurut Rico Pandeirot dari kantor pengacara OC Kaligis & Partners, kasus kepailitan yang diungkapkan pihak ConocoPhillips tersebut seharusnya tidak diajukan lagi karena sudah ditolak di Mahkamah Agung.

Menurut dia, Sapta sebetulnya bukan tidak mau membayarkan denda keterlambatan. Tetapi, dalam kacamata Sapta, seharusnya perusahaan itu tetap memperoleh hak pengerjaan proyek.

Dengan kata lain, Sapta sebetulnya